

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui, Iran adalah Negara yang berada dibagian kawasan Timur Tengah merupakan negara yang mempunyai posisi geografis yang sangat strategis baik dari segi letak yaitu berbatasan dengan Azerbaijan 500 km dan Armenia 35 km di barat laut dan Laut Kaspia di utara, Turkmenistan 1000 km di timur laut, Pakistan 909 km dan Afganistan 939 km di timur, Turki 500 km dan Irak 1.458 km di barat, dan perairan Teluk Persia dan Teluk Oman di selatan sebagai jalur perdagangan.¹ Posisi tersebut selalu menjadikan Iran salah satu faktor terpenting dari segi global negara-negara besar. Namun tidak hanya masalah letak geografis, tetapi juga dari segi ekonomi khususnya minyak. Hal ini disebabkan karena Iran berada di jalur pelayaran internasional. Berikut susunan demografi; dan sistem sosial-politik yang sangat mempengaruhi sikap, cara pandang serta cara Iran memposisikan diri di fora internasional.

Kebijakan luar negeri setiap negara adalah sebuah refleksi aspirasi negara yang bersangkutan dalam berhadapan dengan negara lain di seluruh dunia. Politik luar negeri tersebut paling tidak dipengaruhi oleh tiga faktor: kondisi politik dalam negeri (*domestic politics*), kemampuan ekonomi dan militer, serta lingkungan internasional.² Ketiga faktor ini juga yang ikut mempengaruhi politik luar negeri Iran.

¹ Didapat dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Iran> Internet (diakses tanggal 13 Agustus 2013)

² Lihat William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional (terj)*, Bandung, Sinar Baru, 199

Pada masa kekuasaan Shan Reza Palevi kebijakan politik luar negeri Iran yang menganut prinsip kemandirian bahwa kebijakan luar negeri Iran tidak jauh merupakan bagian hasil perpaduan dan refleksi dari politik dalam negeri yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi regional maupun internasional pada masa itu. Shan berani menyebutkan bahwa kebijakan yang ia ciptakan adalah sebagai 'Kebijakan nasional yang mandiri'. Tapi dalam kenyataannya hal itu tidaklah nasional apalagi mandiri. Pembuat keputusan tidak menciptakan suatu kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi pihak yang menguasai negara adalah mereka yang tak memiliki kapasitas apapun yang untuk mengambil keputusan atas dasar hajat hidup orang banyak karena Shan menempatkan saudara dan kerabat dekatnya sebagai pembuat keputusan itu.³ Saudara dan kerabat dekat ini adalah kaum birokrat kaya dan memiliki harta yang berlimpah. Mereka pada umumnya tidak merasakan penderitaan bangsa Iran yang saat itu sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan.

Kehadiran aspirasi masyarakat dalam menghasilkan suatu kebijakan, membuat Iran tergantung pada kekuatan asing untuk menopang. Maka itu wajar saja bila akhirnya keputusan itu tidak bersifat mandiri apalagi nasional seperti yang disebutkan. Ketergantungan pada negara asing Amerika Serikat (AS) yang membuat kemandirian Iran goyah.⁴ Shan juga tidak ragu untuk mencari sekutu yang tepat, begitu ia menemukannya dengan cepat ia akan menyerahkan kekuatan pada sekutu asing itu. Tujuannya tak lain agar Iran dilindungi dan didukung dalam beberapa hal.

³ Didapat dari: http://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Reza_Pahlavi Internet (diakses tanggal 16 Agustus 2013 pukul 20:00)

⁴ Baca juga: M. Joseph, Mohammad Reza Pahlavi, *The Shah's Story*, 1980

Semenjak itupun, pihak AS juga tak ragu memelihara sekutunya ini agar tak jatuh ke musuh besarnya pada saat itu, Uni Soviet. AS pun mulai memberi perlindungan dengan berbagai bentuk bantuan dalam banyak hal, termasuk nuklir yang dimulai tahun 1950-an. Namun tenaga nuklir Iran sendiri baru mengalami perkembangan berarti pada akhir 1960-an ketika AS menyuplai 5 Mega Watt *Thermal Research Reaktor* (TRR) untuk *Theran Nuclear Research Center* (TNRC).⁵ Sebelum ratifikasi ini selesai, AS sudah lebih dulu membuat beberapa perjanjian dengan Iran. Pertama, Perjanjian antara Iran-AS-IAEA (*Internasional Atomic Energy Agency*). Pemerintah Iran pada bulan Juli 1968, menandatangani NPT (*Non Proliferation Treaty*). Untuk mempercepat negosiasi persetujuan nuklir terutama dari AS. Dan ratifikasinya baru selesai dua tahun kemudian tepatnya di tahun 1970. Bagi Iran, traktat itu sendiri mulai berlaku 5 Maret 1970. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal IV traktat tersebut, maka Iran telah mempunyai hak untuk meneliti, memproduksi dan menggunakan energi nuklir untuk tujuan-tujuan damai tanpa adanya diskriminasi. Disamping itu, Iran juga berhak memperoleh berbagai peralatan, bahan-bahan dan informasi serta teknologi ilmiah energi nuklir. Menurut Amano, semuanya ini diperlukan untuk membuktikan bahwa program nuklir Iran memang dimaksudkan untuk tujuan-tujuan damai.⁶

Untuk mewujudkan rencana besarnya, Shan menekankan pembangunan nuklir yang kuat bagi para penelitinya di *Atom Energy Organization of Iran* (AEOI). Meski tidak mempunyai rencana jelas, namun salah satu mantan dari

⁵ Didapat dari: <http://www.islamtimes.org/vdcgqx9xnak9wq4.lira.html> Internet (diakses tanggal 31 Agustus 2013 pukul 08:02)

⁶ Bruno, Greg, "Iran's Nuclear Program", Council on Foreign Relations, March 10, 2010, Hal 7

ketua badan atom Iran, Akbar Etemad, menyatakan kalau Shan sama sekali tidak memiliki niat penggunaan untuk militer dan murni untuk kebutuhan program sipil.⁷ Pada waktu pendapatan negara yang membengkak karena minyak tahun 1973, Shan memiliki ambisius untuk memajukan Iran dimata dunia internasional. Oleh karena itu ia mengalokasikan uang negara pada bidang militer termasuk pendirian fasilitas nuklir Iran, *Atom Energy Organization of Iran* (AEOI). Sedangkan dalam tahun 1974, Iran menandatangani *Safeguards Agreement* dengan *International Atomic Energy Agency* (IAEA). Dengan demikian, Iran, dalam program proyek pengembangan nuklirnya, bersedia diawasi oleh badan dunia.

Ketika peralihan kekuasaan dari Shan ke Khomeini di tahun 1979, terjadi perbedaan kebijakan tentang nuklir. Khomeini sempat menghancurkan fasilitas nuklir karena dianggap sebagai salah satu bentuk kekuasaan AS di Iran. Pemimpin spiritual itu juga mengancam menghukum mati para peneliti nuklir yang terlibat dalam pembangunan fasilitas tersebut. Akibatnya banyak para peneliti Iran eksodus keluar negeri karena keadaan dalam negeri yang tidak menentu. Namun perang yang berkecamuk dengan Irak 1980-1988 membuat fasilitas nuklir Iran kembali bangkit.⁸

Perang itu, membuat Iran banyak kerugian dari beberapa sisi sumber daya alam, Iran sudah mengalami banyak kehilangan kerana sumber daya uraniumnya terkuras akibat pengeboman atau penyerangan yang kerap terjadi selama delapan tahun. Sehingga Ali Khomeini pun sadar dengan kehilangan ini dan mulai

⁷ Dikutip dari: <http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-21938310> Internet (diakses tanggal 3 September 2013 pukul 03:15)

⁸ Graham, Robert, **Iran: *The Illusion of Power***. New York, St Martin's Press, 1979 Hal 169

membangun kembali proyek nuklir itu pada 1990-an. Iran dibantu oleh China dan Korea Utara, bantuan yang sekedar persenjataan tapi juga amunisi untuk proyek Bushehr (nuklir). *Power plan* akhirnya dibangun di Bushehr dengan kerjasama bersama Siemens dari Jerman dalam rangka, Iran akan menambah 23 reaktor nuklir. Pembangunan tersebut berjalan tanpa gangguan hingga bangkit kembali ditahun 1994 bersama dengan dibukanya pusat penelitian nuklir baru di kota Isafahan. Berikutnya menyusul kota bushehr, Natanz - pengembangan fasilitas uranium, Arak - *heavy water production plant*, ditambah lagi adanya penemuan sumber uranium baru di kota Saghand, provinsi Yanz.⁹ Pengungkapan kedua hal ini jelas membuat pihak Barat berang karena akan memperkuat dan melengkapi siklus nuklir Iran. Singkat kata, pasca jatuhnya Shan terlihat kalau pengembangan nuklir Iran adalah yang terbaik ditimur tengah saat itu. Akan tetapi di akhir tahun 1979-an, pihak AS pun sempat menemukan kecurigaan yang dilakukan oleh para peneliti TNRC. Bahwa terlihat kalau para pemikir ini menggunakan fasilitas nuklir untuk pengembangan senjata nuklir, pengayaan plutonium, dan peneliti laser.

Sedangkan mengenai masalah pengembangan nuklir Iran, Negara ini memang mengalami kemajuan yang signifikan dalam perkembangan teknologi nuklirnya. Semenjak peralihan pemimpin Iran dari Mohammad Khatami ke Mahmoud Ahmadinejad di tahun 2005 yang lalu. Ini merupakan suatu babak baru dalam pengembangan nuklir di Iran. Sebelum menjadi Presiden, Mahmoud Ahmadinejad dalam kampanyenya pun telah menunjukkan sikap arogansi pada hegemoni Barat terhadap bangsanya, lebih-lebihnya berkaitan dengan kebijakan

⁹ Parillo, Jill Marie, "Iran's Nuclear Program", dalam: Hal 169

nuklir yang akan menjadi perhatiannya.

Melihat perkembangan nuklir Iran yang berkembang signifikan dibawah pemerintahan Ahmadinejad sejak 2005 hingga akhir awal 2006, AS berupaya untuk mencegah pengaruh dan kekuasaan ini, konspirasi pun dilakukan AS bersama sekutu-sekutunya menuding bahwa Iran menggunakan nuklir untuk kepentingan militer.¹⁰ AS mendesak Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) sebagai Organisasi nuklir dunia memberi informasi terkait program nuklir Iran. Namun penolakan tersebut dilanjutkan oleh beberapa negara dengan berinisiatif melakukan pertemuan terbatas dalam rangka menyetujui agar permasalahan krisis nuklir Iran segera dibawah ke Dewan Keamanan (DK) PBB. Persoalan ini sebenarnya diperumit mengingat pemerintah Iran telah menandatangani program NTP pada bulan Juli 1968, bahwa Iran mempunyai hak memperoleh, bahan-bahan dan informasi serta teknologi ilmiah energi nuklirnya untuk kedamaian. Pada hal, sejak masa itu negara yang pertamakali menyetujui kepemilikan nuklir atas Iran adalah AS sendiri dan kini berubah menjadi negara yang pertama menentang atas proyek nuklir Iran.

Hingga Agustus 2005 upaya ini terus dilakukan, tiga sekutu AS (Prancis, Jerman dan Inggris) mengadakan pendekatan berbeda dengan menawarkan 'barter' dengan Iran. Tiga Negara Barat itu menawarkan bantuan teknis, akses ke tekhnologi, dengan keuntungan lainnya yang menyangkut dengan nuklir. Segala 'kebijakan' itu akan didapat Iran bila mereka bersedia menghentikan pengayaan

¹⁰ Dikutip dari: <http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-21938310> Internet (diakses tanggal 4 September 2013 pukul 13:09)

uranium.¹¹ Tawaran ini ditolak Iran karena mereka sudah mendapat persetujuan IAEA untuk melanjutkan kegiatan nuklirnya. Sehingga pada Desember 2005, DK PBB mengeluarkan resolusi yang memberi sanksi kepada Iran. Resolusi DK PBB no.1737 itu melarang penjualan maupun transfer teknologi nuklir yang sensitif terhadap Iran.¹²

Upaya Barat terus untuk melakukan negoisasi dengan Iran dan di buka kembali pada Mei 2006, namun respon yang tegas dari Ahmadinejat yang menyatakan 'Kalau bantuan atau apapun bentuknya dikaitkan dengan program teknologi nuklir, mutlak saya tolak'. Ia menegaskan, agar Uni Eropa tidak membuat kesalahan yang sama seperti pernah dilakukan pada Agustus 2005 lalu. Dan saya sendiri yakin, selama ini Uni Eropa dan Amerika sebenarnya 100 persen mengetahui bahwa progam nuklir Iran untuk tujuan damai. Tapi mereka memaksa kami untuk berhenti'.¹³ Karena tidak mendapat tanggapan serius dari Iran, maka DK PBB kembali mengeluarkan resolusi pada Juni 2008, diterapkan sanksi oleh PBB untuk membekukan keuangan dan menjungkirkan potensi Iran.¹⁴ Sehingga terjadi krisis pangan serta melambungnya harga berbagai kebutuhan lainnya di Iran.

Dari sini dapat dilihat, bahwa kebijakan nuklir Iran tidak mengalami kemunduran, sesuai dengan keinginan rakyat Iran. Akibat dari belum adanya titik temu dalam penyelesaian masalah nuklir ini, sanksi terus diperketat oleh Barat yang membatasi ekspor minyak bumi pada 2012, dimana sanksi itu seharusnya

¹¹ Baca juga: http://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/tak-pedulikan-ancaman-sanksi-iran-tetap-lanjutkan-proyek-nuklirnya.htm#.UiUEtUcsu_I (diakses tanggal 5 September 2013 pukul 03:12)

¹² Lihat: Bruno, Greg, "Iran's Nuclear Program", *Council on Foreign Relations*, March 10, 2010, Hal 6

¹³ Dikutip dari: <http://www.rakyatmerdeka.co.id/internasional/2006/05/14/886/Uni-Eropa-Buka-Tawaran-Baru,-Iran-Tetap-Tolak-Internet> (diakses tanggal 8 September 2013 pukul 17:35)

¹⁴ Baca juga: nasional.kompas.com/read/2008/06/04/10283570/Ahmadinejad.Baratlah.Penyebab.Krisis.Pangan-Internet (diakses tanggal 8 September 2013 pukul 19:18)

adalah hak PBB yang dapat menjatuhkannya tetapi dengan pengaruh AS yang cukup besar. Sehingga terus memperpanjang sanksi administrasi.¹⁵ Dan mengakibatkan dampak ekonomi Iran yang semakin memburuk. Tidak hanya itu, efek dari embargo ini juga akan berdampak terhadap perekonomian dunia. Bagi negara-negara yang impor minyak dari Iran dan harus mengurangi stok untuk kebutuhan dalam negeri mereka. Hingga pada tahun 2013 ini, pembahasan mengenai nuklir Iran belum kunjung usai. Dimana AS kembali menuduh Teheran diam-diam mengembangkan senjata nuklir. Sementara, Iran menegaskan program nuklir kami adalah untuk tujuan kepentingan sipil saja.¹⁶ Lima anggota tetap DK PBB ditambah dengan Jerman, sudah melakukan perunding untuk memecahkan kebuntuan soal nuklir Iran, tapi upaya itu tidak menghasilkan kemajuan yang berarti. Hingga masa jabatannya sebelum Maret 2013, Ahmadinejad tetap menjaga komitmen mengenai perkembangan nuklirnya yaitu untuk kesejahteraan bangsa Iran dan bukan untuk membuat senjata nuklir seperti yang dituduhkan AS dan sekutu-sekutunya. Sebenarnya disini bisa dipahami jika pandangan dari berbagai pihak, terutama antara AS-Iran yang berbeda pandangan terhadap isu nuklir tersebut. Hanya saja ini karena perbedaan pijakan yang diambil. Pandangan Iran mengacu atas dasar kebutuhan dan keinginan untuk pengembang teknologi, sedangkan pandangan lain berdasarkan atas kekhawatiran dan kecurigaan akan terjadinya penyelewengan pada program tersebut.

Dari berbagai asumsi tersebut, maka ini akan dijadikan dasar dalam pembahasan isu nuklir pada politik luar negeri Iran. Melihat pandangan kedua

¹⁵ Dikutip dari: <http://jaringnews.com/internasional/amerika/29394/berikut-arogansi-baru-amerika-atas-iran> Internet (diakses tanggal 5 September 2013 pukul 06:47)

¹⁶ Dikutip dari: <http://international.sindonews.com/read/2013/06/06/42/746803/as-ampuni-9-negara-karena-kurangi-impor-minyak-iran> Internet (diakses tanggal 9 September 2013 pukul 09:37)

tersebut yang paling sulit dipecahkan terutama adanya kepentingan global dimana isu ini merupakan turunan dari perang dingin yang terjadi antara AS dan Rusia terutama dalam program NTP. Pertama Iran berhak mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir sesuai dengan perjanjian antara AS-Iran-IAEA yang telah menandatangani NPT (*Non Proliferation Treaty*) pada 5 Maret 1970. Dimana PBB juga telah menyepakati bahwa setiap negara mempunyai hak untuk mengembangkan teknologi tanpa intervensi negara lain. Kedua IAEA sebagai organisasi nuklir dunia memberi informasi yang terkait dengan program nuklir Iran.¹⁷ Sebagai Negara merdeka seperti Iran tentu mempunyai kebijakan dan karena juga mereka mempunyai kemampuan sumber daya alam dan manusia yang di miliki.¹⁸ Sehingga Iran berhak untuk memiliki nuklir sesuai dengan ketentuan internasional yang telah disepakati.

B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

Bagaimana Strategi Mahmoud Ahmadinejad Dalam Menggunakan Isu Nuklir Pada Politik Luar Negeri Iran (2005-2013)?

C. Kerangka Teori

Untuk dapat menganalisa lebih jauh persoalan yang akan dibahas, maka penulis memerlukan beberapa kerangka dasar teori dan konsep sebagai

¹⁷ Didapat dari http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Tenaga_Atom_Internasional Internet (diakses tanggal 12 September 2013 pukul 05:13)

¹⁸ Didapat dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Iran> Internet (diakses tanggal 13 Agustus 2013)

pegangan pokok secara umum. Dengan teori atau konsep tersebut kita dapat melanjutkan penelitian dalam merangkai peristiwa sebagai pendukung penelitian ini di antaranya:

1. Teori Balance of Power

Teori *balance of threat* merupakan teori yang dicetuskan oleh Stephen M. Walt yang menjelaskan bahwa aliansi secara umum dilihat sebagai respon negara terhadap ancaman. Respon yang ditimbulkan negara memunculkan dua kemungkinan formasi aliansi yang akan dipilih oleh negara, yaitu melakukan penyeimbangan (*balancing*) atau *bandwagoning*. Berdasarkan teori *balance of threat* ini, pilihan aliansi bukan hanya sebagai respon terhadap *power* semata, tetapi lebih kepada respon terhadap *power* yang paling mengancam. Berbeda dengan sudut pandang realis yang melihat *balancing* sebagai perilaku negara untuk menghindari dominasi negara yang memiliki *power* lebih kuat dalam rangka menciptakan *balance of power*, neorealist melalui teori *balance of threat* melihat bahwa kecenderungan *balancing* dilakukan negara untuk menghindari dominasi negara atau koalisi lain yang mengancam. Dalam kondisi seperti ini, negara bisa saja melakukan *balancing* dengan negara *strong power* jika negara dengan *power* yang lemah lebih mengancam dan berbahaya. Negara-negara juga cenderung melakukan *balancing* terhadap negara yang terlihat agresif. Disisi lain, negara juga memiliki kemungkinan untuk melakukan *bandwagoning* yaitu beraliansi dengan negara yang lebih kuat dan menjadi ancaman terbesar.¹⁹

¹⁹ Stephen M. Walt, "Alliance Formation and the Balance of World Power", dalam M. Brown, S. Lynn-Jones, dan S. Miller, *The Perils of Anarchy: Contemporary Realism and International Security*, (Cambridge: The MIT Press, 1995) pp.209-219.

Terdapat empat faktor selain *power* yang dapat mempengaruhi level ancaman. *Pertama* adalah *aggregate power* yaitu total besarnya sumberdaya yang dimiliki suatu negara seperti populasi, kemampuan militer dan industri, serta teknologi, Semakin besar *aggregate power* suatu negara, semakin besar pula potensi ancaman yang dihasilkan terhadap negara lain. *Aggregate power* menjadi komponen penting untuk memberikan ancaman terhadap yang lain. *Kedua* adalah *proximity* atau jarak dari ancaman. Suatu negara yang berada di dekat negara yang mengancam akan menghadapi ancaman yang lebih besar daripada negara yang jaraknya lebih jauh. *Ketiga* adalah kemampuan menyerang atau *offensive capability*. Negara dengan kemampuan menyerang yang besar biasanya lebih dipilih sebagai aliansi daripada negara yang lemah militernya atau hanya memiliki kemampuan bertahan, namun di sisi lain, besarnya kemampuan menyerang suatu negara juga dapat menimbulkan ancaman bagi negara lain. *Keempat* adalah maksud untuk menyerang. Negara yang agresif, serta memiliki ambisi untuk menyerang akan menimbulkan ancaman bagi negara lainnya. Teori *balance of threat* ini menjelaskan bahwa dalam menghadapi ancaman dari luar, negara cenderung untuk melakukan *balancing* terhadap suatu ancaman. Semakin suatu negara memperlihatkan usaha untuk mendominasi yang lain, maka negara-negara lain akan bergabung untuk melawan ancaman dominasi tersebut.²⁰

Kelebihan dari teori *balance of threat* yang dipaparkan oleh Walt adalah bahwa Walt dapat membuktikan pilihan aliansi bukan hanya sebagai respon terhadap *power* semata seperti apa yang terdapat dalam teori *balance of power*,

²⁰ Stephen M. Walt, *Ibid.*, pp. 216-221

tetapi lebih kepada respon terhadap *power* yang mengancam. Dalam kondisi seperti ini, negara bisa saja melakukan aliansi dengan negara *strong power* jika negara dengan *power* yang lemah lebih mengancam dan berbahaya. Walt juga memaparkan dengan jelas empat indikator sumber ancaman selain *power*.²¹ Di sisi lain, *teori balance of threat* juga memiliki kelemahan yaitu teori ini hanya mempertimbangkan faktor ancaman dari luar. Sementara mengabaikan perilaku negara yang tidak merasa terancam yang beraliansi untuk alasan lain selain keamanan.²² Selain itu, tidak semua indikator dalam teori *balance of threat* dapat menjelaskan bagaimana suatu negara dianggap sebagai suatu kekuatan yang mengancam. Namun, teori *balance of threat* merupakan teori yang paling mampu menjelaskan respon dalam menggunakan isu nuklir pada politik luar negeri Iran karena Iran merasa terancam terhadap negara penentang atas kebijakan program nuklirnya, sehingga Iran pun melakukan aliansi dengan negara-negara yang ikut serta untuk mendukungnya dari ancaman negara yg tidak mendukungnya seperti, AS dan sekutu-sekutunya. Ataupun sebaliknya yang mendukung Iran, adalah Uni soviet dan lain-lainnya sebagai bagian dari startegi Iran untuk mencapai tujuannya.

2. Nuclear Deterrence

Konsep *deterrence* pada umumnya merupakan konsep dimana satu pihak berusaha meyakinkan lawan yang potensial bahwa resiko dan biaya dari tindakan yang mereka ajukan jauh dari keuntungan yang mungkin mereka

²¹ *Ibid.*, pp. 209-219

²² Randall L. Schweller, "Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist Back In", *International Security*, Vol. 19, No.1 (MIT Press: Summer, 1994), hlm. 83

harapkan untuk dicapai.²³ Thomas Scelling dalam tulisannya *the strategy of conflict* menjelaskan *deterrence* sebagai:

"*deterrence is concerned with influencing the choices another party will make, and doing it by influencing his expectations of how we will behave. It involves confronting him with evidence for believing that our behavior will be determined by his behavior.*"²⁴

Dalam hal ini *deterrence* terkait dengan mempengaruhi pilihan yang akan dibuat oleh pihak lain, dan dilakukan dengan cara untuk mempengaruhi ekspektasinya mengenai bagaimana kita akan berperilaku. *Deterrence* sendiri merupakan fenomena psikologis dan sifatnya yang tidak stabil. Kesuksesan *deterrence* diukur dari peristiwa yang tidak terjadi, dan seseorang tidak dapat menunjukkan secara meyakinkan bahwa musuh menahan diri tindakan ini atau itu karena ancaman yang eksplisit atau implisit dari pembalasan yang tidak dapat diterima.²⁵

Secara spesifiknya, Albert Wohlstetter, seorang ahli strategi nuklir menyatakan bahwa *nuclear deterrence* dilakukan sebagai:

"*to deter an attack means being able to strike back in spite of it. It means, in other words, a capability to strike second.*"²⁶

Kunci dari kapabilitas yang dimaksud adalah kemampuan pengamanan yang bersifat dalam pembalasan, yaitu kekuatan *second strike* yang dapat menunggangi musuh di *first strike* dan kemudian memberikan kerusakan yang

²³ Steven Pifer, Richard C. Bush, et.al, "U.S. Nuclear and Extended Deterrence: Considerations and Challenges" dalam *Foreign Policy Arm Control Series, Paper 3, May 2010*, pp.1

²⁴ Thomas C. Schelling, *The Strategy of Conflict* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1960), pp. 13

²⁵ Jeffrey Record, "Nuclear Deterrence, Preventive War, and Counter Proliferation" dalam *Policy Analysis No.519*, July 8 2004, pp. 3.

²⁶ Albert Wohlstetter, "The Delicate Balance of Terror," *Foreign Affairs* (January 1959), pp. 213

tidak dapat diterima pada daerah lawan. *Nuclear deterrence* tidak mencoba untuk mencegah negara dari memperoleh senjata nuklir, tetapi lebih terlihat untuk mencegah penggunaan senjata nuklir tersebut dengan memegang sandera yang dapat ditarget dari negara musuh baik teritorial, kepemimpinan, industri, kekuatan militer, dan kota-kota.²⁷

Deterrence selalu dipertimbangkan menjadi kebijakan utama dalam menghadapi negara musuh yang memperoleh atau berusaha memperoleh senjata pemusnah massal daripada melakukan *preventive war* yang hampir selalu buruk dan lebih kepada pilihan penyerahan diri. *Deterrence* dalam penggunaan senjata nuklir secara nyata merupakan pilihan kebijakan yang lebih menarik daripada perang untuk mencegah akuisisinya.²⁸

Karena *survival* merupakan naluri utama dari negara-negara, maka negara-negara secara nyata menolak untuk mengambil resiko terhadap kehancuran mereka sendiri. Barry Posen sendiri menyatakan bahwa terdapat kepercayaan umum diantara mengambil keputusan AS setelah berakhirnya Perang Dingin bahwa senjata nuklir menahan serangan nuklir pada seseorang atau aliansinya, serta menahan invasi konvensional terhadap teritori satu pihak. Senjata nuklir juga dapat menahan penggunaan dari senjata pemusnah massal non nuklir.²⁹

Menurut Spiegel (2004) terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebuah negara agar *deterrence* bekerja, yaitu:

²⁷ Jeffrey Record, *Op. Cit.*, pp.3-6

²⁸ Jeffrey Record, *Ibid.*

²⁹ Jeffrey Record, *Ibid.*, pp.5

a. Komitmen

Sebagai langkah awal dari *deterrence*, negara harus memiliki komitmen akan "menghukum" negara lain yang berani melakukan serangan kepada negara yang bersangkutan. Dalam artian lain, negara yang berada dalam posisi bertahan harus dengan tegas membuat garis batasan dan memberi peringatan kepada negara yang menantanginya bahwa jika melewati garis batasan tersebut penderitaanlah yang akan dirasakan olehnya. Dalam menekankan komitmen negara, yang dibutuhkan adalah sebuah langkah yang definitif dan spesifik. Fungsi *deterrence* akan gagal jika negara bersikap ambigu dan tidak memiliki komitmen yang kuat untuk "menghukum" negara yang melakukan serangan.

b. Kapabilitas

Langkah kedua adalah komitmen yang jelas pun tidak akan berarti banyak jika negara tidak punya alat untuk melaksanakannya. Karena *deterrence* adalah meyakinkan negara lain bahwa melakukan kesalahan-seperti menyerang negara yang dalam posisi bertahan-maka negara haruslah memiliki kekuatan berupa kapabilitas untuk menyerang balik negara lawan. Bahkan jika tingkat *deterrence* terlihat lemah, negara harus terlihat meyakinkan musuhnya, bahwa ini bukanlah kekuatan keseluruhan yang dimilikinya.

c. Kredibilitas

Syarat terakhir adalah mengenai kredibilitas negara yang melakukan *deterrence*. Kredibilitas negara, masa lalu negara yang bersangkutan, dan gambaran secara umum mengenai negaranya membantu agar *deterrence* dapat berhasil. Kredibilitas membantu negara dalam melaksanakan komitmen dan membangun kapabilitas agar meyakinkan negara lain tidak melakukan agresi kepada negara yang dalam posisi bertahan. Dengan kredibilitas ini dalam pikiran negara agresor, maka *deterrence* akan berjalan baik (Spiegel, 2004: 421-423).

Secara umum, pengertian *deterrence* adalah bagaimana membuat musuh takut untuk menyerang (Bartholomees Jr, 2006: 100). Alat-alat yang menunjukkan kapabilitas militer biasanya digunakan untuk membuat negara lainnya takut untuk melakukan serangan kepada negara yang memiliki kapabilitas yang kuat. Tetapi bagaimana bila sebuah negara tidak memiliki kapabilitas yang kuat untuk melakukan *deterrence*? Jawabannya bisa ditemukan lewat teori/konsep (*nuclear deterrence*).

Seperti yang dikemukakan Waltz dalam Art dan Jervis (2000), negara kuat akan berpikir panjang dan cenderung ragu-ragu untuk menyerang negara lemah tapi memiliki nuklir. Memang jika negara memiliki nuklir, bahkan dari fasilitasnya saja, akan dianggap sebagai negara yang menanggung resiko yang kecil akan diserang negara lain. Resiko ini akan semakin berkurang jika

pemerintahan yang memiliki nuklir secara kuat termotivasi untuk menjaga negaranya (Buzan, 1991: 169). Negara yang akan menyerang dipaksa untuk menanggung resiko yang besar jika meremehkan *nuclear deterrence*.

Mengenai senjata nuklir yang bisa digunakan, Quinlan (1991) memiliki pendapat yang sama dengan Gray (1986). Menurutnya, jika senjata nuklir memiliki peranan dalam pencegahan perang, maka mereka (senjata nuklir) haruslah operasional. Senjata nuklir bukanlah barang pajangan atau hanya sebuah simbol dalam bidak catur hubungan antar negara, senjata yang lemah tidak akan memberikan dampak *power* yang signifikan (Quinlan, 1991: 247).

Berdasarkan Penjelasan mengenai semua teori yang diutarakan Penulis seperti *nuclear deterrence*, dan *blance of power* memiliki hubungan antara satu dengan lainnya dan tidak saling bertentangan. *Balance of threat* merupakan respon dalam menggunakan isu nuklir pada politik luar negeri Iran dan meminimalisir ancaman keamanan yang mungkin muncul. Cara penanganan penghilangan ancaman bisa dilakukan dengan menggunakan cara penangkalan (*deterrence*) yang idenya datang dari neo realisme.

D. Hipotesis

Berdasarkan pada rumusan masalah dan mengacu pada kerangka teori yang penulis ajukan, penulis merumuskan hipotesa bahwa “Strategi Mahmoud Ahmadinejad Dalam Menggunakan Isu Nuklir Pada Politik Luar Negeri Iran (2005-2013)” adalah:

Mahmoud Ahmadinejad menggunakan isu nuklir sebagai strategi *balance of power* dan *nuclear deterrence* untuk melawan musuh-musuhnya seperti Amerika, Israel, Inggris, Prancis, Jerman dan sekutu-sekutu lainnya.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana strategi Mahmoud Ahmadinejad dalam menggunakan isu nuklir pada politik luar negeri Iran dari 2005 hingga 2013.

Bagi para penstudi hubungan internasional, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk menganalisis bagaimana proses strategi Mahmoud Ahmadinejad dalam menggunakan isu nuklir pada politik luar negeri Iran (2005-2013). Dalam hal inipun, akan terlihat upaya Iran menghadapi tekanan dari pihak Barat seperti AS dan sekutunya.

Tidak kalah pentingnya, penelitian ini juga sebagai bagian dari ajang untuk mempraktekkan ilmu yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan, dengan mengaplikasikan teori-teori, konsep-konsep ke HI-an yang telah penulis pelajari selama masa perkuliahan. Penelitian ini juga sebagai upaya memperkaya kajian studi ilmu hubungan internasional secara empiris tentang strategi Mahmoud Ahmadinejad dalam menggunakan isu nuklir pada politik luar negeri Iran dan kondisi yang telah terjadi di fora internasional, sekaligus sebagai bagian dari prasyarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana S-1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Jangkauan Penelitian

Batasan penulisan atau jangkauan penelitian dalam sebuah penelitian sangat diperlukan. Hal ini untuk menghindari adanya penyimpangan pembahasan dan pembuktian terhadap hipotesa dan pokok permasalahan yang telah diajukan. Lebih jauh, pembatasan dimaksudkan agar obyek penelitian menjadi jelas dan spesifik, agar permasalahan dan kajian tidak melebar dari wacana yang telah ditetapkan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membatasi kajian pada strategi Mahmoud Ahmadinejad dalam menggunakan isu nuklir pada politik luar negeri Iran dari 2005 hingga 2013. Pada dasarnya kebijakan nuklir Iran, Ahmadinejad sangat antusias untuk menunjukkan jati diri dan martabat Bangsaanya. Dimana isu nuklir Iran ini tentu akan melibatkan pihak lain seperti AS dan sekutunya, oleh karena itu penulis akan mencoba menjelaskan fenomena tersebut.

Secara periodik, penelitian ini akan mengkaji lebih jauh berbagai isu kebijakan nuklir Iran pasca jatuhnya rezim Shah Reza Pahlevi dari terpilihnya Ali Khomeini sebagai presiden Iran serta dilanjutkan dengan periode Akbar Hashemi Rafsanjani dan Mohammad Khatami.

G. Methodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian *kualitatif* (deskriptif). Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun

kilas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.³⁰

Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, dengan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data sekunder, seperti buku teks, terbitan berkala, jurnal, majalah, surat kabar, dokumen, makalah, dan bahan-bahan lainnya.³¹ Tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan berbagai buku, terbitan, majalah, surat kabar, dokumen, literatur, makalah, dan bahan-bahan lain yang berbentuk elektronik (yang biasa didapat melalui instrumen internet) tentunya berhubungan dengan judul skripsi.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan, penelitian skripsi ini terdiri dari beberapa bab dan sub bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah kenapa penelitian ini dilakukan, yang mana dari situ kemudian dapat disimpulkan rumusan masalahnya. Bab ini juga dilengkapi dengan beberapa sub bab yang menerangkan kerangka teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini, hipotesa, serta batasan penelitian.

³⁰ Noh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998, hal. 63.

³¹ Gorys Keraf, *Komposisi*, Ende, Nusa Indah, 1984, hal. 165.

BAB II SEJARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN NUKLIR DI IRAN

Pada bab ini, penelitian akan mengambil fokus kajian pada pemaparan proses kepemimpinan yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan nuklir Iran antaranya adalah: Ali Khameini sebagai presiden Iran serta dilanjutkan dengan periode Akbar Hashemi Rafsanjani dan Mohammad Khatami. Sebelum Ahmadinejad menjabat sebagai presiden pada 2005 hingga 2013 berlangsung. Adapun pada saat masa kekuasaan Imam Khameini ini ada tiga presiden Iran diantaranya adalah: *Pertama* Abolhasan Banisadr, *kedua* Muhammad Ali Rajai dan *ketiga* Ali Khameini. Dan diantara Abolhasan Banisadr dan Muhammad Ali Rajai disini sengaja tidak dipaparkan oleh penulis dengan alasan rentang masa kepemimpinannya terlalu pendek.

BAB III KONTROVERSI ISU NUKLIR IRAN

Pada bab ini fokus pembahasan lebih ditekankan pada temuan dan hasil penelitian dari berbagai pihak yang mendukung dan menentang terhadap pengembangan nuklir Iran serta menjelaskan pandangan negara yang awalnya mendukung dan menjadi tidak mendukung atau abstain dalam program nuklir Iran.

BAB IV STRATEGI AHMADINEJAD DALAM MENGGUNAKAN ISU NUKLIR PADA POLITIK LUAR NEGERI IRAN (2005-2013)

Pada bab ini, penelitian akan mengambil fokus kajian pada Bagaimana strategi Ahmadinejad dalam menggunakan isu nuklir pada politik luar negeri Iran diantaranya:

- Iran telah menandatangani NTP (*Non Proliferation Treaty*) pada 5 Maret 1970 dan banyak mengikuti perjanjian.
- Iran memberi kewenangan pada IAEA untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas proyek nuklirnya.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian ini.